



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**TAHUN
2021**

DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi

pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



KEY SUWIGIYO, S.Sos., M.Si.

Rembina Utama Muda

NIP 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	27
2.2. Program dan Kegiatan	28
2.3. Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	58
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021
- Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021
- Tabel 3.1.1.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.1.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021;
- Tabel 3.1.1.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.1.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.1.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.1.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.1.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.1.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.2.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.2.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021;
- Tabel 3.1.2.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.2.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.2.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.2.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.2.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.2.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- Tabel 3.1.3.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.3.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021;
- Tabel 3.1.3.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.3.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.3.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.3.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.3.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.3.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.3.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2021 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90 %. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp 16.910.571.445,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan serta 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2021 adalah Rp 14.065.460.354,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 83.18 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 47 Tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 12 kali, yaitu :

- Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
- Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
- Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
- Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
- Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
- Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
- Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
- Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2013 - 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
- Tahun 2015 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
- Tahun 2017 - 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, MM.
- Tahun 2020 - 2021 dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.
- Tahun 2020 - Sekarang dipimpin oleh Bapak Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.

Selama 47 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - i. Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial;
 - ii. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial;
 - iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial;
 - iv. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang sosial; dan
 - v. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan programkerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - i. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;

- ii. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan;
- iii. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- iv. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- v. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
- vi. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
- vii. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- viii. pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
- ix. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- x. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- xi. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
- xii. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

C. Subbagian Tata Usaha

- 1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. melaksanakan administrasi umum meliputi

- ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- v. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - vi. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - vii. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas;
 - viii. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - ix. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
 - x. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
 - xi. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kanmtor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - xii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - xiii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - xiv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

D. Subbagian Program

1) Subbagian Program, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian

Program;

- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- v. menyusun rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- vi. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Dinas;
- vii. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- viii. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- ix. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- xi. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- xii. menyusun laporan pelaksanaan prograM dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- xiii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Subbagian Keuangan

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
 - iv. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
 - v. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
 - vi. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
 - vii. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
 - viii. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
 - xi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.
- 2) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :
 - i. perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - ii. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan

dan jaminan sosial; dan

- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- vi. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- vii. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengiriman balita terlantar, anak dan lanjut usia terlantar serta anak bermasalah psikologis ke instansi/pihak terkait;
- viii. melaksanakan pemberian rekomendasi permohonan adopsi anak;
- ix. melaksanakan pendampingan sosial diluar panti/konseling kepada anak terlantar, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia;
- x. melaksanakan bimbingan lanjutan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak bermasalah

sosial psikologis

- xi. melaksanakan fasilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial anak
- xii. melaksanakan bimbingan sosial dan/atau bimbingan teknis serta bimbingan lanjut usaha ekonomi produktif lanjut usia potensial;
- xiii. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial anak dan lanjut usia;
- xiv. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- xv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- xvi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- vi. melaksanakan pelayanan sosial dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis, gelandangan, pengemis, pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), korban perdagangan orang, orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan eks tuna susila;
- vii. melaksanakan pelayanan sosial tempat penampungan sementara (shelter) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- viii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- ix. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
- x. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :
 - i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- vi. melaksanakan seleksi korban bencana yang layak dibantu berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana
- vii. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan penyaluran bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan dapur umum untuk tanggap darurat bencana serta pengelolaan logistik bencana;
- viii. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
- ix. menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling, intervensi psikososial pemulihan trauma, bimbingan teknis/ketrampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada korban bencana;
- x. melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana;
- xi. melaksanakan advokasi bagi anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH), anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar;

- xii. memberikan pelayanan informasi, konseling dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial;
- xiii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- xiv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- xv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :
 - i. Perumusan rencana kerja dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 - ii. perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;

- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan
- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. Seksi Penanganan Fakir Miskin

1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas

- i. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- vi. melaksanakan pembentukan dan bimbingan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan.
- vii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan

- viii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

- 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas:
 - i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - vi. melaksanakan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin;
 - vii. melaksanakan pengelolaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - viii. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian terkait Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan

Kapasitas; dan

- xi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- vi. melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecuali Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- vii. melaksanakan pengelolaan bantuan hibah/bansos bagi organisasi sosial masyarakat untuk pengembangan kegiatan organisasi;
- viii. memberikan rekomendasi bagi organisasi sosial masyarakat ditingkat daerah maupun provinsi;

- ix. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- x. melaksanakan kegiatan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- xi. memberikan rekomendasi sumbangan, pengumpulan uang/barang dan undian gratis berhadiah;
- xii. melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- xiii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- xiv. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
- xv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :
 - i. perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - ii. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;

- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- v. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan

1) Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- vi. menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum

- dan kualitas keluarga;
- vii. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - viii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - ix. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Kualitas hidup Perempuan;
 - x. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. Seksi Pengarusutamaan Gender

1) Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :

- i. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi basil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- vi. melaksanakan analisis dalam upaya penguatan

pengarusutamaan gender;

- vii. melaksanakan pendataan, pemetaan dan fasilitasi jejaring dibidang pengarusutamaan gender;
- viii. melaksanakan pengembangan informasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan serta pembinaan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;
- ix. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- x. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- xi. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :
 - i. perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan

- pengarusutamaan hak anak;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- 3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
 - i. menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

- vi. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- vii. menyiapkan bahan, fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- viii. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- ix. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- x. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data perempuan dan anak;
- xi. menyiapkan bahan upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
- xii. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- xiii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- xiv. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

S. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

- 1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas:

- i. menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- ii. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- iii. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- iv. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- v. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- vi. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang pengarusutamaan hak anak;
- vii. menyiapkan bahan fasilitasi pengarusutamaan hak anak;
- viii. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak;
- ix. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- x. melaksanakan pengarusutamaan pada lembaga anak baik pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- xi. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
- xii. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
- xiii. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

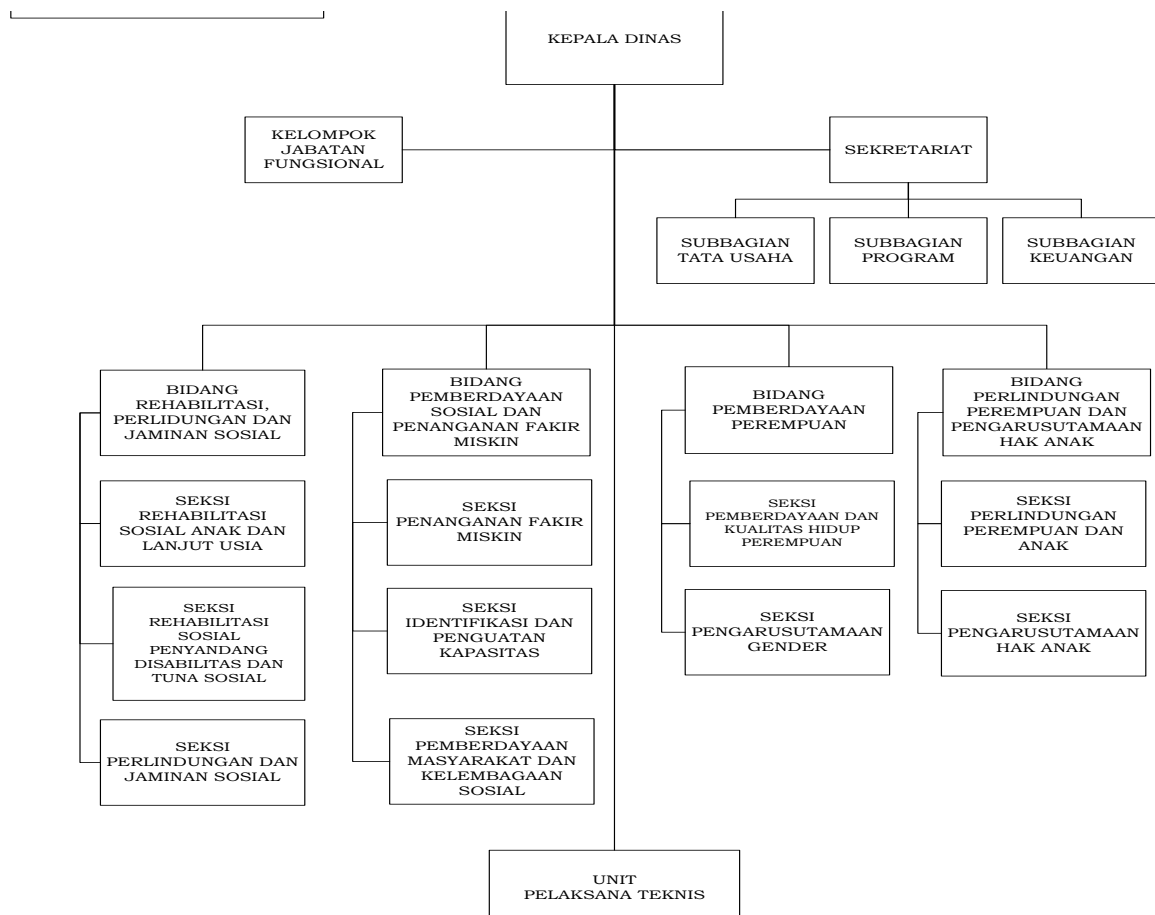
Pengarusutamaan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

T. Unit Pelaksana Teknis

- 1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :
 - i. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
 - ii. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



1.1.3 Sumber Daya Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2021 terdapat 40 (Empat Puluh) pegawai terdiri dari 18 (delapan belas) orang pejabat struktural, 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis, 1 (satu) orang pejabat fungsional pranata computer, 2 (dua) orang pejabat fungsional pekerja sosial dan 18 (delapan belas) orang staf.

1.1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Pada Tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan adanya Pandemi Covid-19 harus melakukan refocusing anggaran hampir 50% atau pemangkasan anggaran untuk Program Percepatan Penanganan Covid-19 sehingga banyak program dan Kegiatan yang tidak bisa terlaksana dengan optimal. Masyarakat Kota Probolinggo juga mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;
- c. Meningkatnya kasus terhadap anak dan perempuan dari tahun sebelumnya hal ini dibuktikan dengan terdapat 47 Kasus yang mengadu pada P2TP2A sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat 42 Kasus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

- a. Mewujudkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penerima Bantuan dan Program Pengentasan Kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran;
- b. Mewujudkan Penyandang Masalah kesejahteraan social masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat;

Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

- a. Terlaksananya Pendampingan dan Penyaluran Bantuan untuk warga miskin;
- b. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan social;
- c. Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga

2.2 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2021

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	16.507.217.445	13.689.256.924
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.456.956.723	6.379.559.820
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.924.900	47.756.080
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.907.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	32.924.900	32.848.580

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.553.765.552	5.516.709.230
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.394.679.552	5.366.228.230
Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.936.000	118.633.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	32.150.000	31.848.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.695.000	6.665.000
PenataUsahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.695.000	6.665.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.707.000	142.463.420
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	156.707.000	142.463.420
Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.061.496	240.123.390
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.525.050	41.468.850
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.300.000	21.300.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.619.050	9.513.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.680.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.396	1.187.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.956.000	124.620.950
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	43.750.000	37.352.890
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	124.646.850	115.578.999

Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.650.000	4.649.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.496.850	103.429.999
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	320.155.925	310.263.701
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.414.175	132.973.301
pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.745.000	47.236.400
pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	130.996.750	130.054.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	71.544.000	71.075.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	71.544.000	71.075.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.544.000	71.075.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.055.481.900	883.595.404
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	728.000.000	606.374.900
Penyediaan Permakanan	728.000.000	606.374.900
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	327.481.900	277.220.504
Penyediaan Permakanan	223.050.000	173.770.600
Penyediaan Sandang	104.431.900	103.449.904
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.039.448.800	765.468.680
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	94.272.000	91.711.320
Pemantauan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	94.272.000	91.711.320
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	945.176.800	673.757.360
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	679.431.000	509.556.200
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	254.084.050	152.616.160
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.661.750	11.585.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.790.027.022	5.498.196.450
Perlindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	7.686.965.622	5.408.121.450
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.686.965.622	5.408.121.450
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terdapat Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	103.061.400	90.075.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	103.061.400	90.075.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	93.759.000	91.361.570
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	93.759.000	91.361.570
Rehabilitasi dan Pra Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.759.000	73.361.570
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	351.709.000	347.678.430
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	200.742.000	198.298.930
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59.622.000	59.517.500
Koordinasi dan Sinkronisasi PerumUsahan Kebijakan Pelaksanaan PUG	27.462.000	27.357.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.800.000	7.800.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	24.360.000	24.360.000
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan	-	-

PUG termasuk PPRG		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.120.000	138.781.430
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	37.017.000	36.895.180
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	104.103.000	101.886.250
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan k Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4.421.000	4.421.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.421.000	4.421.000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4.421.000	4.421.000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	62.660.000	62.160.000

Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.000.000	36.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.660.000	22.160.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.250.000	13.750.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.410.000	8.410.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	16.991.000	16.416.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	840.000	840.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	840.000	840.000

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.151.000	15.576.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	16.151.000	15.576.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	66.895.000	66.382.500
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	66.895.000	66.382.500
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan k Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.775.000	50.357.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.120.000	16.025.000
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	51.645.000	28.555.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	51.645.000	28.555.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.645.000	28.555.000
Fasilitasi Bulahan Bakti Gotong Royong Masyarakat	51.645.000	28.555.000

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021, Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :


Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2021


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021			
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87 %
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Kategori Kota Layak Anak	90 % Madya

Program (5)	Anggaran (6)	Keterangan (7)
- Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.456.956.723,-	DAU
- Program Pembudayaan Sosial	Rp 71.544.000,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	Rp 1.053.481.900,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.039.448.800,-	DAU/DID
- Penanganan Bencana	Rp 7.790.027.022,-	DAU/DID
- Pengelolaan Tarnan Makam Pahlawan	Rp 93.759.000,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 200.742.000,-	DAU
- Perlindungan Perempuan	Rp 62.660.000,-	DAU
- Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 0,-	DAU
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 4.421.000,-	DAU

- Pemenuhan Hak Anak (PIA)	Rp 66.895.000,-	DAU
- Perlindungan Khusus Hak Anak	Rp 16.991.000,-	DAU
- Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 31.645.000,-	DAU
Jumlah	Rp. 16.910.571.445,-	

Probolinggo, November 2021
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA,

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, M.M, M.HP


RPY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2021 dibandingkan dengan Target, dibandingkan dengan Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2021, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- b. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021;
- c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- e. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- f. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- g. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- h. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- i. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2021, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2021 atau target akhir tahun Renstra 2015-2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi

dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.1.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	91.62%	105%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tabel 3.1.1.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	92 %	91.62%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.1.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	91.62%	102%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	91.62%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9.884.957.722	58.45%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	91.62 %	105%	9.884.957.722	7.147.260.534	72%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	105%	72 %	69%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	91.62%	Adanya Perubahan APBD dengan bertambahnya anggaran dan target penerima bantuan, sehingga menyebabkan realisasi melebihi target yang ditetapkan di tahun awal masa periode yaitu tahun 2019

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	91.62%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta

			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Perlindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terdapat Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%	51,58%	106%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tabel 3.1.2.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%	49.48%	51.58%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	49.25 %	51.58%	105%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	51.58%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.2.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	205.163.000	1.21%
--	-------------	--------------

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.2.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50 %	51.58 %	106%	205.163.000	202.719.930	99 %

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.2.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	106%	99%	93%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.2.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%	51.58%	-

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%	51.58%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.3.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
-------------------------	--------	-----------	------------

Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90%	109%	121%
Kategori Kota Layak	Madya	Nindya	Nindya

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tabel 3.1.3.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90%	161.5%	109%
Kategori Kota Layak	Madya	Madya	Nindya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.3.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	75%	109%	145%
Kategori Kota Layak	Madya	Nindya	Nindya

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	109%	-	-

Kategori Layak	Kota	Nindya	-	-
-----------------------	-------------	--------	---	---

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	79.651.000	0.47 %
Kategori Kota Layak	66.895.000	0.40 %

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90%	109%	121%	79.651.000	78.576.000	99%
Kategori Kota Layak	Madya	Nindya	Nindya	66.895.000	66.382.500	99%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan	121%	99%	69 %

Anak				
Kategori Layak	Kota	Nindya	99%	99%

- H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.3.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab	
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90%	109%	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak semakin meningkat, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19	
Kategori Layak	Kota	Madya	Nindya	-

- I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.3.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90%	109%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kategori Kota Layak	Madya	Nindya	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp 16.910.571.445,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan serta 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran

untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2021 adalah Rp 14.065.460.354,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 83.18 %. Secara rinci, Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Tahun 2021
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	16.507.217.445	13.689.256.924	82,93%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.456.956.723	6.379.559.820	98,80%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.924.900	47.756.080	99,65%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.907.500	99,38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.924.900	32.848.580	99,77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.553.765.552	5.516.709.230	99,33%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.394.679.552	5.366.228.230	99,47%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.936.000	118.633.000	93,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	32.150.000	31.848.000	99,06%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.695.000	6.665.000	99,55%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.695.000	6.665.000	99,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.707.000	142.463.420	90,91%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	156.707.000	142.463.420	90,91%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.061.496	240.123.390	97,19%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.525.050	41.468.850	99,86%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.300.000	21.300.000	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.619.050	9.513.700	98,90%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.396	1.187.000	96,39%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.956.000	124.620.950	99,73%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik pada SKPD	43.750.000	37.352.890	85,38%
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintan Daerah	124.646.850	115.578.999	92,73%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.650.000	4.649.000	99,98%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.496.850	103.429.999	91,94%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	7.500.000	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintan Daerah	320.155.925	310.263.701	96,91%
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.414.175	132.973.301	94,03%
pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.745.000	47.236.400	98,93%

pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	130.996.750	130.054.000	99,28%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	71.544.000	71.075.000	99,34%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	71.544.000	71.075.000	99,34%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.544.000	71.075.000	99,34%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	0,00%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.055.481.900	883.595.404	83,71%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	728.000.000	606.374.900	83,29%
Penyediaan Permakanan	728.000.000	606.374.900	83,29%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	0,00%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	327.481.900	277.220.504	84,65%
Penyediaan Permakanan	223.050.000	173.770.600	77,91%
Penyediaan Sandang	104.431.900	103.449.904	99,06%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	0,00%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.039.448.800	765.468.680	73,64%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	94.272.000	91.711.320	97,28%
Pemantauan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	94.272.000	91.711.320	97,28%

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	945.176.800	673.757.360	71,28%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	679.431.000	509.556.200	75,00%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	254.084.050	152.616.160	60,07%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.661.750	11.585.000	99,34%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.790.027.022	5.498.196.450	70,58%
Perlindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	7.686.965.622	5.408.121.450	70,35%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.686.965.622	5.408.121.450	70,35%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terdapat Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	103.061.400	90.075.000	87,40%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	103.061.400	90.075.000	87,40%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	93.759.000	91.361.570	97,44%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	93.759.000	91.361.570	97,44%
Rehabilitasi dan Pra Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.759.000	73.361.570	96,84%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	100,00%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	351.709.000	347.678.430	98,85%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	200.742.000	198.298.930	98,78%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59.622.000	59.517.500	99,82%

Koordinasi dan Sinkronisasi PerumUsahan Kebijakan Pelaksanaan PUG	27.462.000	27.357.500	99,62%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.800.000	7.800.000	100,00%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	24.360.000	24.360.000	100,00%
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	0,00%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.120.000	138.781.430	98,34%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	37.017.000	36.895.180	99,67%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	104.103.000	101.886.250	97,87%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	0,00%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan k Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4.421.000	4.421.000	100,00%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.421.000	4.421.000	100,00%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4.421.000	4.421.000	100,00%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN			99,20%

PEREMPUAN	62.660.000	62.160.000	
Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.000.000	36.000.000	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.660.000	22.160.000	97,79%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.250.000	13.750.000	96,49%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.410.000	8.410.000	100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	16.991.000	16.416.000	96,62%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	840.000	840.000	100,00%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan Kekerasan terdapat Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	840.000	840.000	100,00%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.151.000	15.576.000	96,44%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	0,00%

Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	16.151.000	15.576.000	96,44%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	66.895.000	66.382.500	99,23%
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	66.895.000	66.382.500	99,23%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan k Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.775.000	50.357.500	99,18%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.120.000	16.025.000	99,41%
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	51.645.000	28.555.000	55,29%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	51.645.000	28.555.000	55,29%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.645.000	28.555.000	55,29%
Fasilitasi Bulahan Bakti Gotong Royong Masyarakat	51.645.000	28.555.000	55,29%
Jumlah Belanja	16.910.571.445	14.065.490.354	83,18%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategi tahun 2015-2019.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2021. Dengan realisasi anggaran 2020 sebesar 81 %, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.

4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik, untuk menghindari kendala-kendala yang ada misalnya dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya Refocusing pada Tahun 2021 untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu. Pentingnya mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2021 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan

kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah

LAMPIRAN

Matriks Renstra

Instansi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
 Indikator Tujuan : Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup lebih mandiri

Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan hidup lebih mandiri	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n jumlah penduduk </p>	7,1	7,05	7,0	6,95	6,90	6,90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target tahun						Cara mencapai tujuan dan sasaran	
	Uraian				2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Strategi/kebijakan
1	Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>$\alpha = 0$</p>	7,2	7,1	7,05	7,0	6,95	6,90	6,90	Strategi : Pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan ketrampilan bagi	Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, November 2021
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87 %
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	48,50%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Kategori Kota Layak Anak	90 % Madya


Program (5)	Anggaran (6)	Keterangan (7)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.456.956.723,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial	Rp 71.544.000,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	Rp 1.055.481.900,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.039.448.800,-	DAU/DID
- Penanganan Bencana	Rp 7.790.027.022,-	DAU/DID
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 93.759.000,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 200.742.000,-	DAU
- Perlindungan Perempuan	Rp 62.660.000,-	DAU
- Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 0,-	DAU
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 4.421.000,-	DAU

- Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	66.895.000,-	DAU
- Perlindungan Khusus Hak Anak	Rp	16.991.000,-	DAU
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	51.645.000,-	DAU
Jumlah		Rp. 16.910.571.445,-	

WALIKOTA,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Probolinggo, November 2021
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 |

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEEMPUN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021

TRIWULAN I
Tahun Anggaran 2021

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Target Kinerja					CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Anggaran Kas				Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Kinerja				Anggaran Kas Triwulan I	Anggaran Kas Triwulan II	Anggaran Kas Triwulan III	Anggaran Kas Triwulan IV		
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Presentase PMKS	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N	87	0%	30%	30%	27%	0%	URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	17	18	19	20	21	22	
												URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.255.727.376	2.495.313.551	3.756.063.261	2.229.766.238	1.674.564.326	1.113.464.696	10,88%	
												URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	7.207.393.776	1.793.902.852	2.635.257.575	1.676.145.363	1.140.487.966	1.090.174.696	13,13%	
												PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000	41.929.600	28.256.500	16.506.500	14.807.400	6.261.000	6,17%	
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.112.305.525	1.376.733.601	2.347.512.250	1.425.141.138	962.918.536	1.004.670.614	16,44%	
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	4.000.000	3.500.000	1.000.000	1.575.000	10,50%		
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.500.000	35.429.600	24.256.500	13.006.500	13.807.400	4,68%		
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.938.723.525	1.367.721.101	2.302.991.250	1.381.620.138	886.391.036	1.000.667.614	16,85%	
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124.882.000	-	31.209.500	31.209.500	62.466.000	-	0,00%	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	48.700.000	9.012.500	13.312.500	12.312.500	14.062.500	4.203.000	8,63%	
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.130.000	3.905.000	6.825.000	-	-	-	0,00%	
												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.130.000	3.305.000	6.825.000	-	-	-	0,00%	
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.096.626	48.887.426	35.736.400	32.736.400	31.736.400	17.883.000	11,99%	
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Attribut Keleنگانannya	13.299.426	-	-	-	-	-	0,00%	
												Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.797.200	35.888.000	35.736.400	32.736.400	31.736.400	17.883.000	13,17%	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.739.550	133.034.100	114.295.925	110.502.525	76.900.000	27.887.892	6,41%	
												Penyediaan Perawatan dan Pengkapan Kantor	60.935.300	28.784.100	10.745.925	16.745.275	4.660.000	1.390.000	2,28%	
												Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	20.959.000	7.800.000	3.000.000	6.799.000	3.000.000	-	0,00%	
												Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	25.619.050	7.000.000	10.000.000	2.619.050	6.000.000	-	0,00%	
												Penyediaan Ban Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.200.000	390.000	2,03%	
												Facilities Kunjungan Tamu	8.400.000	2.200.000	2.000.000	1.900.000	2.000.000	450.000	5,36%	
												Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.019.200	68.250.000	70.250.000	64.479.200	51.040.000	17.449.750	6,87%	
												Dukungn Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	46.000.000	13.000.000	12.000.000	12.000.000	9.000.000	8.208.142	17,84%	
												Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	157.884.350	69.050.000	31.687.500	29.006.000	28.146.850	23.725.540	15,03%	
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	3.200.000	2.444.000	1.006.000	100.000	-	0,00%	
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.996.650	30.150.000	28.400.000	27.400.000	28.046.850	23.725.540	20,81%	
												Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengkapan Kantor	37.137.500	35.700.000	837.500	600.000	-	-	0,00%	
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	241.744.725	80.963.125	70.950.000	64.252.600	25.978.800	9.546.650	3,99%	
												Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.747.225	41.290.625	39.950.000	36.482.800	17.023.800	9.546.650	7,08%	
												pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	17.045.000	11.000.000	8.000.000	8.955.000	-	0,00%	
												pemeliharaan/keababilitas Gedung Kantor dan Lainnya	61.997.500	22.227.500	20.000.000	19.770.000	-	-	0,00%	
												PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	102.414.000	32.832.250	15.797.250	23.465.000	30.599.500	-	0,00%	
												Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	102.414.000	32.832.250	15.797.250	23.465.000	30.599.500	-	0,00%	
												Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.544.000	14.847.250	14.847.250	11.850.000	29.999.500	-	0,00%	
												Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.870.000	17.985.000	950.000	11.635.000	600.000	-	0,00%	
												PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.455.935.900	298.020.110	537.525.000	329.200.000	291.206.790	7.351.000	0,59%	
												Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlahantar, Anak Terlahantar, lanjut Usia Terlahantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sosial	878.700.000	190.093.000	324.159.000	182.730.000	181.718.000	-	0,00%	
												Penyediaan Pemakanan	728.000.000	184.490.000	180.390.000	182.730.000	180.390.000	-	0,00%	
												Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.700.000	5.603.000	143.769.000	-	1.328.000	-	0,00%	
												Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial	577.255.900	107.927.110	213.370.000	146.470.000	108.468.790	7.351.000	1,27%	
												Penyediaan Pemakanan	223.050.000	72.050.000	123.175.000	16.125.000	11.700.000	-	0,00%	
												Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	154.431.900	34.588.110	37.210.000	41.879.000	40.584.790	7.351.000	4,76%	
												Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	149.774.000	1.289.000	52.985.000	-	46.446.000	49.054.000	0,00%	
												Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	50.000.000	-	-	42.020.000	7.980.000	-	0,00%	
												PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	712.527.800	198.151.500	264.372.875	196.335.375	93.668.050	4.078.000	0,57%	
												Pemeliharaan Anak-Anak Terlahantar	94.272.000	32.071.500	31.472.500	17.446.500	3.181.500	2.071.000	2,20%	
												Pemeliharaan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlahantar	84.272.000	32.071.500	31.472.500	17.446.500	3.181.500	2.071.000	2,20%	
												Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	618.255.800	126.080.000	222.900.375	178.888.875	90.486.550	6.021.000	0,97%	
												Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	333.725.000	78.199.000	118.656.000	122.544.500	14.325.500	2.007.000	0,60%	
												Facilities Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	254.084.050	47.881.000	88.701.000	41.341.000	76.161.050	4.014.000	1,58%	
												Facilities Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	30.446.750	-	15.443.375	15.003.375	-	-	0,00%	

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja (%)	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Anggaran Kas				Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					Anggaran Kas Triwulan I	Anggaran Kas Triwulan II	Anggaran Kas Triwulan III	Anggaran Kas Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
														Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58.692,310	17.865,310	13.659,000	13.659,000	13.709,000	2.071,000	3,53%
														PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	96.400,000	22.800,000	74.220,000	-	-	-	0,00%
														Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.400,000	22.800,000	74.220,000	-	-	-	0,00%
														Aktivasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan k. Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.000,000	-	69.000,000	-	-	-	0,00%
														Kordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.400,000	22.800,000	5.220,000	-	-	-	0,00%
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	126.925,000	11.000,000	-	13.850,000	8.500,000	-	0,00%
														PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	126.925,000	11.000,000	-	13.850,000	8.500,000	-	0,00%
														Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pejakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.925,000	11.000,000	-	13.850,000	8.500,000	-	0,00%
														Facilitasi Bulatan Bkt Gabong Royong Masyarakat	126.925,000	11.000,000	-	13.850,000	8.500,000	-	0,00%

Probolinggo, 25 Mei 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN,
PEMERINTAH KABUPATEN ANAK KOTA PROBOLINGGO



RETNO WICAKANTO, S.Sos., M.Si.
Penyaha Utama Muda
NIP.196707111988091 001

Catatan :

- Kolom 6 berisi tentang formulasi perhitungan indikator kinerja (IKU/PD)
- Kolom 7, 9, 10, 11, 12 ditulis target indikator tanpa satuan indikator
- Kolom 13 berisi tentang realisasi kinerja triwulan I
- Kolom 14 berisi tentang capaian kinerja dalam persentase (rumus : kolom 12 dibagi kolom 8)
- Kolom 22 berisi tentang capaian anggaran dalam persentase (rumus : kolom 21 dibagi kolom 17)

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan indikator kinerja	Target Kinerja				CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja	Anggaran Kas					Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)		
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Anggaran Kas Triwulan I	Anggaran Kas Triwulan II	Anggaran Kas Triwulan III	Anggaran Kas Triwulan IV	Pagu			Anggaran Kas Triwulan I	Anggaran Kas Triwulan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pengesahan Kelembagaan terpadu Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.800.000	9.640.000	8.860.000	6.300.000	6.300.000	-	21	0,00%
				Kategori Kota Layak Anak	Kategori I = Pratama, Kategori II = Nindia, Kategori III = Utama, dan Kategori IV=Kota Layak Anak	Madya	Madya	.	.	Madya	.	.	.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.692.310	17.865.310	24.859.000	13.859.000	13.709.000	6.527.500	9,37%	
														Pengembangan Komunikas: Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000.000	-	11.000.000	-	-	-	0,00%	
														Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	58.692.310	17.865.310	13.859.000	13.859.000	13.709.000	6.527.500	11,12%	
														PROGRAM PENUH HAK ANAK	96.400.000	22.180.000	74.220.000	-	-	43.450.000	45,07%	
														Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.400.000	22.180.000	74.220.000	-	-	43.450.000	45,07%	
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69.000.000	-	69.000.000	-	-	29.050.000	42,10%	
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.400.000	22.180.000	5.220.000	-	-	14.400.000	52,55%	
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%	
														PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%	
														Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%	
														Fasilitas Balaiah Bktik Gotong Royong Masyarakat	126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%	

Catatan :

- Kolom 6 berisi tentang formulasi perhitungan indikator kinerja (IKU/PD)
- Kolom 7,9,10,11,12 ditulis target indikator tanpa satuan indikator
- Kolom 13 berisi tentang realisasi kinerja triwulan I
- Kolom 14 berisi tentang capaian kinerja dalam persentase (rumus : kolom 12 dibagi kolom 8)
- Kolom 22 berisi tentang capaian anggaran dalam persentase (rumus : kolom 21 dibagi kolom 17)

Probolinggo, 25 Mei 2021
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO



SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Peminda Utama Muda
NIP. 19670711 198903 1 001

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021**

TRIWULAN III
Tanun Anggaran 2021

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula/Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Sasaran Indikator Kinerja	Target Kinerja				CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Kas				Realisasi Anggaran Triwulan III	CAPAIAN (%)		
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan I	Triwulan II
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Presentase PKMS	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang Terpenuhi kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang terpenuhi kebutuhannya	87	%	0%	30%	30%	27%	0%	0%	URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.255.727.376	2.485.313.351	3.756.083.261	2.329.786.238	1.674.364.326	6.776.488.964	66,08%
				Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang menjadi target di Tahun N									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.207.387.376	1.753.502.852	2.635.257.575	1.678.145.363	1.140.487.986	5.376.689.130	81,54%
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.500.000	14.929.800	28.256.500	16.506.500	14.807.400	33.815.080	33,12%
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	6.500.000	4.000.000	3.500.000	1.000.000	9.815.000	65,43%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.500.000	35.429.800	24.256.500	13.006.500	13.807.400	23.800.080	27,51%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.112.505.925	1.376.733.601	2.347.512.250	1.425.141.138	962.918.536	5.364.460.454	87,76%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.938.723.525	1.367.721.101	2.302.991.250	1.381.620.138	886.391.036	5.284.389.454	88,98%
														Penyediaan Barang Cakupan dan Pengelolaan Kantor	124.882.000	-	31.208.500	31.208.500	62.465.000	58.614.000	46,94%
														Penyediaan Barang Cakupan dan Pengelolaan Kantor	48.700.000	9.012.500	13.312.500	12.312.500	14.062.500	21.447.000	44,04%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.130.000	3.305.000	6.825.000	-	-	2.425.000	23,94%
														Penatalaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.130.000	3.305.000	6.825.000	-	-	2.425.000	23,94%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.096.626	48.887.426	35.736.400	32.736.400	31.736.400	82.061.420	55,04%
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.239.426	13.239.426	-	-	-	-	0,00%
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.797.200	35.588.000	35.736.400	32.736.400	31.736.400	82.061.420	60,43%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.732.550	133.034.100	114.295.925	76.900.000	76.900.000	137.777.182	31,68%
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.935.300	29.784.100	10.745.925	16.745.275	4.660.000	31.902.850	52,36%
														Penyediaan Barang Cakupan dan Pengelolaan Kantor	20.559.000	7.800.000	3.000.000	6.759.000	3.000.000	6.300.000	17,66%
														Penyediaan Barang Cakupan dan Pengelolaan Kantor	25.619.050	7.000.000	10.000.000	2.619.050	6.000.000	3.213.700	12,54%
														Penyediaan Ban Beca dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.200.000	2.750.000	14,22%
														Penyediaan Ban Beca dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000	1.187.000	14,22%
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.019.200	68.290.000	70.290.000	64.479.200	51.040.000	67.848.950	28,71%
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	46.000.000	13.000.000	12.000.000	12.000.000	9.000.000	27.264.682	59,27%
														Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	157.884.350	69.030.000	31.681.500	29.006.000	28.146.850	80.034.493	50,69%
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	3.200.000	2.444.000	1.005.000	100.000	3.493.000	51,75%
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.986.850	30.190.000	28.400.000	27.400.000	28.046.850	76.941.493	67,14%
														Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	37.137.500	35.700.000	837.500	600.000	-	-	0,00%
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	241.744.725	80.563.125	70.950.000	64.252.800	25.978.800	176.323.501	72,94%
														Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Palak, dan Pelebaran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.747.225	41.290.025	39.950.000	36.482.800	17.023.800	90.165.501	66,92%
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	17.045.000	11.000.000	8.000.000	8.955.000	24.982.000	54,14%
														Pemeliharaan Instalasi Cerdas Kantor dan Lainnya	61.897.500	22.227.000	20.000.000	19.770.000	-	61.795.000	99,67%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	102.414.000	32.532.250	15.797.250	23.485.000	30.598.500	27.800.000	26,95%
														Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	102.414.000	32.532.250	15.797.250	23.485.000	30.598.500	27.800.000	26,95%
														Penyediaan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.544.000	14.847.250	14.847.250	11.850.000	29.999.500	27.800.000	38,58%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.870.000	17.685.000	950.000	11.635.000	600.000	-	0,00%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.455.955.900	295.020.110	537.529.000	329.200.000	291.206.790	412.648.804	28,34%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	878.700.000	190.093.000	324.189.000	182.730.000	181.718.000	354.480.000	40,34%
														Penyediaan Permakanan	728.000.000	184.490.000	180.390.000	182.730.000	180.390.000	354.480.000	48,69%
														Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.700.000	5.603.000	143.769.000	-	1.328.000	-	0,00%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	577.255.900	107.927.110	213.370.000	146.470.000	109.488.790	58.168.804	10,08%
														Penyediaan Permakanan	223.060.000	72.050.000	123.175.000	16.125.000	11.700.000	600.000	0,27%
														Penyediaan Sandang	154.431.900	34.598.110	37.270.000	41.879.000	40.754.790	57.868.804	37,28%
														Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	149.774.000	1.288.000	52.995.000	46.446.000	49.054.000	-	0,00%
														Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	50.000.000	-	-	42.020.000	7.980.000	-	0,00%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja					CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Pagu	Anggaran Kas					Realisasi Anggaran Triwulan III	CAPAIAN (%)								
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I			Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II		Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			Triwulan IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>Pemeliharaan Anak-Anak Terlahantar</p> <p>Pemantauan terhadap Pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlalahantar</p> <p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</p> <p>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</p> <p>Perfindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</p> <p>Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terdapat Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Stage</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</p> <p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>Rehabilitasi dan Pra Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>															16	17	18	19	20	21	22
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Indikator Sasaran	Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Jumlah Total Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan	48,5	%	0%	0%	0%	48,50%	0%	0%	<p>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</p> <p>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>PROGRAM PENGARUSUTANAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi PerumLashan Kebijakan Pelaksanaan PUG</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Atvokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</p> <p>Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</p> <p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>Atvokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</p> <p>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan k Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan dan Pemantauan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Kerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>															16	17	18	19	20	21	22
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Indikator Sasaran	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	90	%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	<p>Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan dan Trafficking di Kota Probolinggo Tahun (N-1) - Tahun (N)</p> <p>Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan dan Trafficking di Kota Probolinggo Tahun (N-1) - Tahun (N)</p>															16	17	18	19	20	21	22

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja					CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja	CAPAIAN (%)						
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I				Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1	2	3	4	5	6 Induk kekerasan dan tracking di Kota Probolinggo Tahun (N-1)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															8.900.000	3.750.000	3.750.000	1.000.000	-	2.000.000	23,53%
															31.162.000	6.820.000	24.342.000	-	-	19.250.000	61,77%
															14.250.000	-	14.250.000	-	-	13.750.000	96,49%
															16.912.000	6.820.000	10.092.000	-	-	5.500.000	32,52%
															100.492.310	27.305.310	33.219.000	19.959.000	20.009.000	10.474.000	10,42%
															30.800.000	9.640.000	8.560.000	6.300.000	6.300.000	840.000	2,73%
															30.800.000	9.640.000	8.560.000	6.300.000	6.300.000	840.000	2,73%
															69.892.310	17.665.310	24.699.000	13.659.000	13.709.000	9.634.000	13,82%
															11.000.000	-	11.000.000	-	-	-	0,00%
															58.892.310	17.665.310	13.699.000	13.709.000	13.709.000	9.634.000	16,41%
															96.400.000	22.180.000	74.220.000	-	-	45.075.000	46,76%
															96.400.000	22.180.000	74.220.000	-	-	45.075.000	46,76%
															69.000.000	-	69.000.000	-	-	29.050.000	42,10%
															27.400.000	22.180.000	5.220.000	-	-	16.025.000	58,49%
															126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%
															126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%
															126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%
															126.925.000	11.000.000	-	13.850.000	8.500.000	5.715.000	4,50%

Probolinggo, 06 Oktober 2021
KEPALA TIMAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAERAH PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO



PROBOLINGGO, 06 Oktober 2021
KEPALA TIMAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAERAH PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
NIP. 196707111988091001

- Catatan:
- Kolom 6 berisi tentang formulasi perhitungannya indikator kinerja (KU PD)
 - Kolom 7-9, 10, 11, 12 ditulis target indikator tanpa satuan indikator
 - Kolom 13 berisi tentang capaian kinerja dalam persentase
 - Kolom 14 berisi tentang capaian kinerja dalam persentase (rumus: kolom 12 dibagi kolom 8)
 - Kolom 22 berisi tentang capaian anggaran dalam persentase (rumus: kolom 21 dibagi kolom 17)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEMERINTAH, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021**

PENGUKURAN KINERJA

TRIWULAN IV
Tahun Anggaran 2021

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan indikator kinerja	Target Kinerja				CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Kas				Realisasi Anggaran Triwulan IV (%)		
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				Anggaran Kas Triwulan I	Anggaran Kas Triwulan II	Anggaran Kas Triwulan III	Anggaran Kas Triwulan IV			
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Presentase PMKS	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya X 100 %	87	%	0%	30%	30%	27%	69,37%	80%	URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.807.217.445	1.119.784.396	2.320.573.102	1.979.148.728	11.087.711.219	13.689.258.924	82,93%
														URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	6.456.966.723	1.092.480.396	1.938.294.546	1.458.465.808	1.966.715.971	6.379.559.920	96,80%
														KABUPATEN KOTA	47.924.900	4.866.000	17.711.500	9.642.980	15.884.820	47.796.080	99,65%
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	1.575.000	6.610.000	1.630.000	5.185.000	14.907.500	99,38%
														Kondikasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.924.900	3.111.000	11.101.500	8.012.980	10.699.820	32.848.580	99,77%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.653.766.552	1.088.751.314	1.679.740.113	1.291.085.649	1.574.188.476	5.516.709.230	99,33%
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.394.679.562	1.094.448.314	1.641.532.113	1.253.435.649	1.495.163.476	5.366.228.230	99,47%
														Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.936.000	-	28.821.000	28.793.000	68.322.000	118.633.000	83,46%
														Kondikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	32.150.000	4.233.000	9.387.000	7.857.000	10.703.000	31.848.000	99,06%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.695.000	-	1.480.000	945.000	4.270.000	6.665.000	99,55%
														Penatalaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.695.000	-	1.480.000	945.000	4.270.000	6.665.000	99,55%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.707.000	17.883.000	32.660.500	31.571.920	74.645.580	142.463.420	90,91%
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	-	-	-	-	-	-	0,00%
														Pendanaan dan Pengalangan Administrasi Kepegawaian	156.707.000	17.883.000	32.660.500	31.571.920	74.645.580	142.463.420	90,91%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.061.486	27.887.882	66.361.066	43.528.284	109.284.314	240.123.390	97,19%
														Penyediaan Pelembutan dan Pengalangan Kantor	41.625.050	1.380.000	15.470.850	15.042.000	9.622.200	41.668.850	98,86%
														Penyediaan Pelembutan Rumah Tangga	21.300.000	-	-	3.630.000	17.670.000	21.300.000	100,00%
														Penyediaan Bahan, Obat dan Penggandaan	9.191.050	-	188.700	3.025.350	6.405.350	9.513.700	96,90%
														Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	4.680.000	380.000	1.960.000	780.000	1.950.000	4.680.000	100,00%
														Fasilitas Kunjungan Tamu	1.231.396	450.000	737.000	-	44.396	1.187.000	96,39%
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.956.000	17.449.750	40.484.200	9.915.000	57.107.050	124.620.950	99,73%
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	43.750.000	8.208.142	7.920.266	11.136.284	16.485.318	37.362.880	85,38%
														Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	124.646.850	23.725.540	29.419.868	26.889.085	44.612.397	115.578.999	92,73%
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.650.000	-	2.506.500	986.500	1.157.000	4.649.000	99,98%
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.496.850	23.725.540	26.913.368	25.902.585	35.955.357	103.429.999	91,94%
														Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengekangan Kantor	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000	100,00%
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	320.155.925	9.546.650	110.921.561	55.857.290	143.830.424	310.263.701	96,91%
														Penyediaan Jasa pemeliharaan, Bawa pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.414.175	9.546.650	37.699.461	42.922.390	51.246.674	132.973.301	94,03%
														Semeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.745.000	-	13.627.100	10.734.900	23.383.000	47.268.400	98,83%
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	130.966.750	-	59.595.600	2.200.000	69.201.750	130.864.000	99,28%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	71.544.000	-	17.850.000	9.750.000	43.944.000	71.075.000	99,34%
														Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	71.544.000	-	17.850.000	9.750.000	43.944.000	71.075.000	99,34%
														Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.544.000	-	17.850.000	9.750.000	43.944.000	71.075.000	99,34%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	-	-	-	-	0,00%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.055.481.900	7.351.000	207.547.604	198.022.840	642.560.456	883.595.404	83,71%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial	726.000.000	-	183.320.000	171.180.000	373.520.000	606.374.900	83,29%
														Peningkatan Pemakanan	726.000.000	-	183.320.000	171.180.000	373.520.000	606.374.900	83,29%
														Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	337.481.900	7.351.000	24.227.604	26.862.840	269.040.456	277.220.504	84,65%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	223.050.000	-	600.000	-	222.450.000	173.770.600	77,91%
														Penyediaan Sandang	104.431.900	7.351.000	23.627.604	26.862.840	46.590.456	103.449.904	99,06%
														Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	-	-	-	0,00%
														Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	-	-	-	0,00%
														PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.039.448.800	8.092.000	100.788.200	80.913.385	849.655.215	765.468.680	73,64%
														Pemeliharaan Anak-Terhantar	94.272.000	2.071.000	5.786.500	16.490.400	69.924.100	91.711.320	97,28%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				CAPAIAN Kinerja (%)	Realisasi Kinerja	Anggaran Kas				Realisasi Anggaran Triwulan IV	CAPAIAN (%)			
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
															14.250.000		13.750.000		500.000		13.750.000	96,45%
															8.410.000		5.500.000		2.910.000		8.410.000	100,00%
															16.991.000	2.071.000	4.456.500	3.946.500	6.517.000		16.416.000	96,62%
															840.000			840.000			840.000	100,00%
															840.000			840.000			840.000	100,00%
															16.151.000	2.071.000	4.456.500	3.106.500	6.517.000		15.576.000	96,44%
																						0,00%
															16.151.000	2.071.000	4.456.500	3.106.500	6.517.000		15.576.000	96,44%
															66.895.000		43.450.000	1.623.000	21.820.000		66.382.500	99,23%
															66.895.000		43.450.000	1.623.000	21.820.000		66.382.500	99,23%
															50.775.000		29.060.000		21.725.000		50.357.500	99,18%
															16.120.000		14.400.000		96.000		16.025.000	99,41%
															51.645.000		5.715.000		45.930.000		28.555.000	55,29%
															51.645.000		5.715.000		45.930.000		28.555.000	55,29%
															51.645.000		5.715.000		45.930.000		28.555.000	55,29%
															51.645.000		5.715.000		45.930.000		28.555.000	55,29%
															16.910.371.445.000	1.135.169.396.000	2.472.566.602.000	2.025.376.158.000	11.273.469.289.000		14.085.490.354.000	83,18%

Probolinggo, 04 Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBLINGGO



REK SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Penata Utama Muda
NIP. 19670711198891001

- Catatan :
- Kolom 6 berisi tentang formulasi perhitungan indikator kinerja (IKU/PD)
 - Kolom 7, 8, 10, 11, 12, ditulis target indikator tanpa satuan indikator
 - Kolom 13 berisi tentang realisasi kinerja triwulan I
 - Kolom 14 berisi tentang capaian kinerja dalam persentase (umum : kolom 12 dibagi kolom 8)
 - Kolom 22 berisi tentang capaian anggaran dalam persentase (umum : kolom 21 dibagi kolom 17)

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88 %
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani - Level Kota Layak Anak	100 % Nindya

Program (5)	Anggaran (Rp) (6)	Keterangan (7)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.174.815.849,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial	92.796.900,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	1.027.559.900,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	723.805.700,-	DAU
- Penanganan Bencana	130.999.790,-	DAU
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	101.626.800,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	290.343.900,-	DAU
- Perlindungan Perempuan	252.584.800,-	DAU/DAK
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	3.500.000,-	DAU
- Pemenuhan Hak Anak (PHA)	174.587.700,-	DAU

- Perlindungan Khusus Hak Anak	324.215.000,-	DAU/DAK
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.200.000,-	DAU

Jumlah


Rp. 9.300.036.339,-

WALIKOTA,



HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Probolinggo, Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN

Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah |



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ■ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
e-mail: dinsos.probolinggokota@gmail.com
PROBOLINGGO

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Dari : Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tanggal : Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun
2021**

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu untuk melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan rencana strategis 'meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS' pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 'Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya'. Dalam menghitung pencapaian indikator tersebut, berikut kami rinci data pendukung sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Anak Yatim dengan target 54 Anak terealisasi sebanyak 46 Anak;
- b. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) dengan target 50 Orang terealisasi 18 Orang;
- c. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Eks Napi dengan target 14 Orang terealisasi 13 Orang;

- d. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Disabilitas Mental dengan target 160 Orang terealisasi 146 Orang;
- e. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Fakir Miskin dengan target 202 Orang terealisasi 114 Orang;
- f. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Kelompok Rentan dengan target 440 Orang terealisasi 292 Orang;
- g. Kegiatan Pemberian Bantuan Dipan dan Kasur bagi Lanjut Usia Terlantar dengan target 20 Orang terealisasi 20 Orang;
- h. Kegiatan Pemberian Bantuan Kursi Roda bagi Lanjut Usia dengan target 10 Orang terealisasi 10 Orang;
- i. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan target 27.939 Orang terealisasi 25.808 Orang;

Berdasarkan data pendukung diatas dapat diperoleh hasil pencapaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya sebesar **91,62 %** dari target tahun 2021 sebesar 87 % dengan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 28.889 Orang dibagi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N sebesar 26.467 Orang dan dikalikan 100 Persen.

Demikian Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL



PRAMITO LEGOWO, S.Sos.

NIP 19660114 198602 1 001

**HASIL EVALUASI KEGIATAN BANTUAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

NO	Uraian kegiatan	DPA OPD 2021			KETERANGAN RINCIAN KEGIATAN			PROGRES REALISASI S/D DESEMBER 2021	
		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	6	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT	ANGGARAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Bantuan Sembako bagi Anak Yatim	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	94.272.000		54	Anak	46	91.711.320	
		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							
		Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar							
Bantuan Sembako bagi ODHA, Eks Napi, dan Disabilitas Mental	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	223.050.000		50	Orang	18	223.050.000	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			14	Orang	13		
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan			160	Orang	146		
Bantuan Sembako bagi Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	254.084.050		202	Keluarga	114	152.616.160	
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah							
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
Bantuan Sembako bagi Kelompok Rentan	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	575.069.250		440	Keluarga	292	443.272.450	
		Kegiatan Perlindungan Sosial Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			20	Orang	20		
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			10	Orang	10		



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ■ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
e-mail: dinsos.probolinggokota@gmail.com
PROBOLINGGO

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Dari : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Tanggal : Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada
Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021.

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu untuk melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan rencana strategis 'meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan' pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 'Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Swasta. Dalam menghitung pencapaian indikator tersebut, berikut kami rinci data pendukung melalui beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Data Perempuan yang bekerja di Lembaga Eksekutif sebanyak 1.680 orang berdasarkan sumber data pilah;
- b. Data Perempuan yang bekerja di Lembaga Legislatif sebanyak 4 Orang berdasarkan sumber data pilah;
- c. Data Perempuan yang bekerja di Swasta sebesar 40.784 Orang berdasarkan sumber data Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;

- d. Data Ibu Rumah Tangga yang menjalankan Industri Rumahan sebanyak 1.406 Orang berdasarkan sumber data pilah;
- e. Data Perempuan Usia Produktif sebanyak 85.055 Orang berdasarkan sumber data Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.

Berdasarkan data pendukung diatas dapat diperoleh pencapaian Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Swasta sebesar **51.58 %** dari target tahun 2021 sebesar 48.50 % dengan Jumlah Data Perempuan yang bekerja di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Swasta sebesar 43.874 Orang dibagi Jumlah Perempuan Usia Produktif dan dikalikan 100 Persen.

Berkaitan hal tersebut diatas, telah kami lampirkan bahan pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana pada lampiran nota dinas ini.

Demikian Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



HANAFIAH, S.H., M.M.

Pembina

NIP 19650804 199203 2 005



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

**Semester
I
Tahun 2021**



Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Pekerjaan
KECAMATAN KADEMANGAN

NO	PEKERJAAN	ATAJARAN			TRIWANG LOR			TRIWUNG KIDUL			POHSANGIT KIDUL			KADEMANGAN			PILANG		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	925	940	1865	855	881	1736	1.056	1.089	2145	641	670	1311	965	1.036	2001	805	830	1635
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		1.157	1157		1.211	1211		1.718	1718		1.164	1164		1.712	1712		1.145	1145
3	PELAJARI/MAHASISWA	782	719	1501	760	668	1428	870	703	1573	466	379	845	780	681	1461	738	580	1318
4	PENSIUNAN	126	68	194	39	13	52	22	10	32	18	9	27	49	22	71	40	28	68
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	202	212	414	112	107	219	78	53	131	30	21	51	100	66	166	79	72	151
6	TNI	36		36	70	1	71	28		26	7		7	35		35	17		17
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	29		29	36		36	8	1	9	4		4	10		10	18		18
8	PERDAGANGAN	10	15	25	13	17	30	36	47	83	24	22	46	8	7	15	6	5	11
9	PETANI/PEKEBUN	33	12	45	35	12	47	54	27	81	86	23	109	84	26	110	30	14	44
10	PETERNAK			0	1		1		1	1	1		1		0				0
11	NELAYAN/PERIKANAN	32	2	34	7		7	9		9	2		2	10		10	13		13
12	INDUSTRI	1	2	3	3		3	5	1	6	3	1	4	1		1		2	2
13	KONSTRUKSI	1		1	5	1	6	11	1	12	6		6	6		6	5	1	6
14	TRANSPORTASI	31		31	24		24	57		57	19		19	24		24	33		33
15	KARYAWAN SWASTA	908	433	1341	903	391	1294	1.165	339	1504	506	141	647	999	270	1269	893	418	1311

NO	PEKERJAAN	MELAYANG			BIRUWUNG LOR			TRIWUNGG KIDUL			POHSANGIT KIDUL			KADEMANGAN			PILANG		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
16	KARYAWAN BUMN	34	17	51	19	9	28	13		13	7		7	14	2	16	25	8	
17	KARYAWAN BUND	4	1	5	1		1	2		2	1		1	2	1	3	3	3	6
18	KARYAWAN HONORER	36	27	63	29	36	65	21	13	34	27	15	42	31	22	53	24	20	44
19	BURUH HARIAN LEPAS	46	12	58	62	17	79	168	26	194	207	16	223	111	2	113	115	12	127
20	BURUH TANJAPERKEBUNAN	34	22	56	91	21	112	66	30	96	95	36	131	31	19	50	50	28	78
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1		1		1	1	1		1	1		1	1		1			0
22	BURUH PETERNAKAN			0			0			0			0			0			0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA		4	4	1	3	4		14	14		1	1	1	2	3		8	8
24	TUKANG CUKUR			0			0	1		1			0			0			0
25	TUKANG LISTRIK	1		1			0			0			0			0			0
26	TUKANG BATU	15		15	25		25	23		23	43		43	36		36	8		8
27	TUKANG KAYU	2		2	5		5	15		15	12		12	32		32	1		1
28	TUKANG SOL SEPATU			0			0	1		1			0			0			0
29	TUKANG LAS PANDAI BESI			0			0			0			0	2		2	2		2
30	TUKANG JAHIT	1		1	1	2	3	1	3	4		2	2	1	3	4	1	1	2

NO	PEKERJAAN	KETAPANG			TRIWUNG LOR			TRIWUNG KIDUL			POHSANGIT KIDUL			KADEMANGAN			PILANG		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
31	TUKANG GIGI			0			0			0			0			0			0
32	PENATA RUAS			0			0			0			0			0			0
33	PENATA RAMBUT			0			0			0			0			0			0
34	MEKANIK	6		6	2		2	6		6	1		1	4		4	3		3
35	SENIMAN	1		1			0	1		1			0			0			0
36	TABIB			0		1	1			0			0			0			0
37	PARAJI			0			0		3	3			0			0			0
38	PENTERJEMAH			0			0			0			0			0			0
39	IMAM MASJID	1		1			0	1		1			0			0			0
40	PENDETA			0	1		1			0			0			0			0
41	PASTOR			0			0			0			0			0			0
42	WARTAWAN	2		2	1		1			0			0			0	2		2
43	USTADZMUBALIGH	6	1	7			0	7	2	9			0	1		1	2		2
44	JURU MASAK			0			0			0			0			0			0
45	ANGGOTA DPR RI			0			0			0			0			0			0

NO	KATEGORI	STANAS		TRAWUNG LOR		TRAWUNG KIDUL		POHSANGIT KIDUL		KADEMANGAN		PILANG		
		P	JML	P	JML	L	JML	L	JML	L	JML	L	P	JML
45	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI		0		0		0		0		0		0	
47	WALIKOTA		0		0		0		0		0		0	
48	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
49	DOSEN	4	3	7	2	2	4	0	0	3	2	5	3	1
50	GURU	49	90	139	32	74	106	35	50	85	15	40	55	36
51	PILOT		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52	PENGACARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	NOTARIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	APRSTEK	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	KANDULIHAN	3	3	3	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
56	UKHTER	4	3	7	2	2	4	2	2	4	1	1	2	1
57	BIDAN		5	5	8	8	6	6	6	6	6	2	2	6
58	PERAWAT	3	6	9	1	10	11	3	7	10	4	5	9	4
59	APOTEKER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	PENYUSUN RADIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	PEKERJAAN	KETAPANG			TRIWUNGG LOR			TRIWUNGG KIDUL			POHSANGIT KIDUL			KADEMANGAN			PILANG		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
61	PELAUT			0			0			0	1	1	1			0			0
62	PENELITI			0	1		1			0	1	1	1			0			0
63	SOPIR	16		16	31		31	42		42	21	21	21	27		27	41		41
64	PEDAGANG	15	21	36	10	13	23	33	37	70	18	27	45	17	10	27	12	16	28
65	PERANGKAT DESA			0			0	1		1		0				0			0
66	KEPALA DESA			0			0			0		0				0			0
67	BIAPAWANBIAPAWATI			0			0			0		0				0			0
68	WIRASWASTA	434	202	636	393	152	545	515	155	670	352	51	403	569	132	701	418	142	560
69	PEKERJAAN LAINNYA	7	1	8	9	1	10	12	4	16	6	1	7	13	2	15	7		7
	TOTAL	3843	3977	7820	3582	3652	7234	4370	4344	8714	2626	2630	5256	4009	4105	811	3418	3401	6819

4



Beranda

Total Pekka
KOTA
PROBOLINGGO
2022 **1435**

Total Pekka Belum
Terverifikasi KOTA
PROBOLINGGO 2022 **0**

Total IR KOTA
PROBOLINGGO 2022 **0**

Total IR Belum
Terverifikasi KOTA
PROBOLINGGO 2022 **0**



Beranda

Grafik

Pekka

PMI

Politik

KDRT

IR

Fasilitas

Workshop

Total PMI
KOTA
PROBOLINGGO
2022 **11**

Total PMI Belum
Terverifikasi
KOTA PROBOLINGGO
2022 **0**

Jumlah Pekka dan IR berdasarkan usia

Usia	Pekka	Ir
15 - 25 (Usia Growing Up)	3	0
26 - 48 (Usia Produktif)	244	0
49 - 64 (Usia Pra Stagnan)	609	0



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ■ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
e-mail: dinsos.probolinggota@gmail.com
PROBOLINGGO

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Dari : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan
Hak Anak

Tanggal : Desember 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada
Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak
Anak Tahun 2021.

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu untuk melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan rencana strategis 'meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak' pada Bidang Perlindungan Perempuan dan dan Pengarusutamaan Hak Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 'Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak'

Pada Tahun 2021, Kasus Kekerasan mengalami penurunan kasus dari target tahun 2021 sebesar 90% dengan pencapaian sekitar 109 % dari tahun sebelumnya naik dengan pencapaian 161.5 %. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Aplikasi SIMPHONI, Kasus Kekerasan terhadap perempuan ialah sebanyak 27 Kasus dan Kasus Kekerasan terhadap Anak ialah sebanyak 20 Kasus.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 'Kategori Kota Layak Anak'

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Probolinggo meraih Penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori 'NINDYA' berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Bapak Walikota Probolinggo.

Berkaitan hal tersebut diatas, telah kami lampirkan data pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana pada lampiran nota dinas ini.

Demikian Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak ini dibuat untu digunakan sebagai mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN PENGARUSTAMAAN HAK ANAK



LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP., M.M.


NIP 19780408199711 2 001



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Dringu No. 13 ■ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
Email: dinasos.probolinggokota@gmail.com
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 460/  /425.109/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.**
NIP : 19670711 198809 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

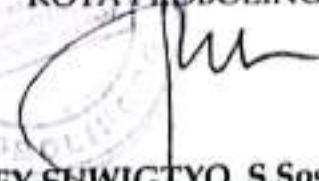
Menerangkan bahwa di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada tahun 2021 terdapat 47 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 27 Kasus;
2. Kasus Kekerasan terhadap Anak sebanyak 20 Kasus;

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**


REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19670711 198809 1 001

REPORT CIRI KORBAN DAN PELAKU
 KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR
 BASIS DATA TANGGAL INPUT
 TANGGAL 01-01-2021 S/D 31-12-2021
ANAK

No	Unit / Instansi	Kasus	S	KASUS ANAK				
				Usia				Anak
				0-5	06-Des	13-17	18-24	
1	Kota Probolinggo	20	L	1	3	7	0	11
			P	1	5	6	0	12
			T	2	8	13	0	23

PEREMPUAN

No	Unit / Instansi	Kasus	S	KASUS PEREMPUAN					
				Usia				Anak	Dewasa
				18-24	25-44	45-59	60+		
1	Kota Probolinggo	27	L	0	0	0	0	0	0
			P	5	18	3	1	0	27
			T	5	18	3	1	0	27

